

LAPORAN KINERJA TRIWULAN III 2025

**BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA V**

Sumatera Selatan - Lampung - Bangka Belitung

Jalan Inspektur Yazid
No 7490 KM 2,5
Kota Palembang

INSTAGRAM

@bp3kp_sumatera5

EMAIL

bp3kp_sumatera5@pkp.go.id



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Triwulan III Tahun 2025 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Laporan triwulan ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari SAKIP yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V meliputi 3 (tiga) provinsi yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Lampung. Laporan ini sekiranya dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan dan transparan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan laporan ini. Kami menyadari dalam penyusunan laporan ini terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mengharapkan saran dan kritik untuk perbaikan dalam penyusunan laporan selanjutnya.

Palembang, September 2025

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN SUMATERA V**



Yustin Patia Primordia, S.T., M.Si.
NIP. 19720626 199703 2 003



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Daftar Tabel	4
Daftar Gambar	5

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	6
B. Tugas dan Fungsi	7
C. Struktur Organisasi	8

BAB II CAPAIAN KINERJA

A. Target Kinerja Triwulan III	11
B. Metode Pengukuran Kinerja	15
C. Capaian Target Triwulan	15
D. Permasalahan dan Faktor Keberhasilan	20

BAB III PENUTUP

A. Rencana Tindak Lanjut	21
B. Bukti Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan Sebelumnya	21

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target Penetapan Kinerja Triwulan Satker BP3KP Sumatera V	11
Tabel 2.2 Target Penetapan Kinerja Triwulan Satker PKP Prov. Sumatera Selatan	12
Tabel 2.3 Target Penetapan Kinerja Triwulan Satker PKP Prov. Lampung	13
Tabel 2.4 Target Penetapan Kinerja Triwulan Satker PKP Prov. Bangka Belitung	14
Tabel 2.5 Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan Satker BP3KP Sumatera V	15
Tabel 2.6 Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan Satker PKP Provinsi Sumatera Selatan	16
Tabel 2.7 Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan Satker PKP Provinsi Lampung	18
Tabel 2.8 Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan Satker PKP Provinsi Bangka Belitung	19
Tabel 3.1 Bukti Tindak Lanjut Permasalahan pada Triwulan III	21



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur dan Organisasi BP3KP Sumatera V	8
Gambar 1.2 Struktur Pegawai BP3KP Sumatera V	9



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dibentuk pada tahun 2024 yang secara hukum ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang ditetapkan pada tanggal 8 November 2024. Kementerian PKP menjalankan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Dalam mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029, Kementerian PKP melaksanakan salah satu program prioritas ke-13 yaitu menjamin hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan. Presiden menetapkan sasaran pembangunan dan renovasi sebanyak 3 (tiga) juta unit rumah, yang terdiri atas 1 (satu) juta rumah di kawasan perkotaan, 1 (satu) juta rumah di kawasan perdesaan, dan 1 (satu) juta rumah di wilayah pesisir, yang kemudian diwujudkan melalui penyediaan infrastruktur dasar pemukiman yang berkualitas dan berkeadilan, serta penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan.

Sebagai upaya dalam mencapai sasaran tersebut, Kementerian PKP menetapkan strategi pelaksanaan melalui tiga peran utama, yaitu: (1) sebagai operator dalam pelaksanaan pembangunan fisik; (2) sebagai regulator dalam perumusan kebijakan serta percepatan proses perizinan; dan (3) sebagai fasilitator dalam penyediaan kemudahan akses terhadap perumahan bagi masyarakat.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V sebagai bagian dari Kementerian PKP dibawah naungan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman bertugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PKP dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang efektif, efisien dan transparan, instansi pemerintah termasuk didalamnya Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V menyusun dan melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Salah satu bagian dari SAKIP yaitu Laporan Kinerja Triwulan. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V dalam mendukung penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman oleh Kementerian PKP.

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Triwulan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Tahun 2024 adalah:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelapiran Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan merupakan pelaporan realisasi capaian dalam melakukan kegiatan, sistem pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan organisasi, serta terus mengupayakan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Hal tersebut juga merupakan upaya yang dilakukan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V dalam rangka mengimplementasikan Laporan Kinerja Triwulan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan organisasi serta dalam rangka perwujudan *good governance* melalui media pertanggungjawaban yang sistematis dan melembaga.

B. Tugas dan Fungsi

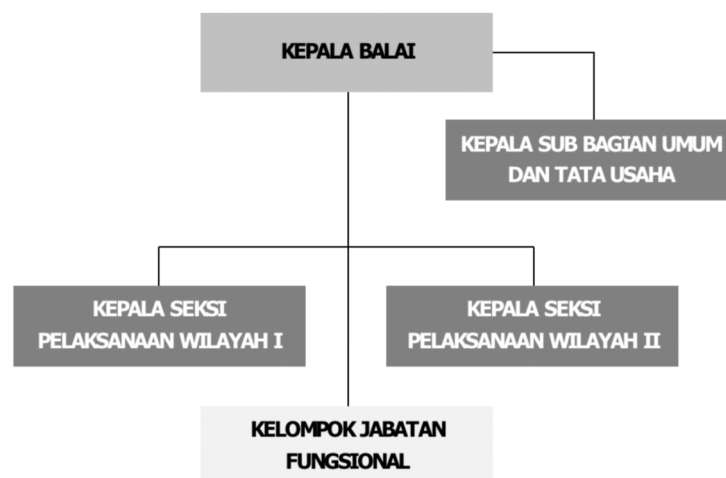
Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, BP3KP memiliki tugas utama yaitu melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial, serta fasilitasi serah terima aset. Dalam melaksanakan tugas, BP3KP menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- b. Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;

- c. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- d. Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- f. Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial;
- h. Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
- i. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
- j. Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
- l. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
- m. Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
- n. Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuapan; dan
- o. Pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

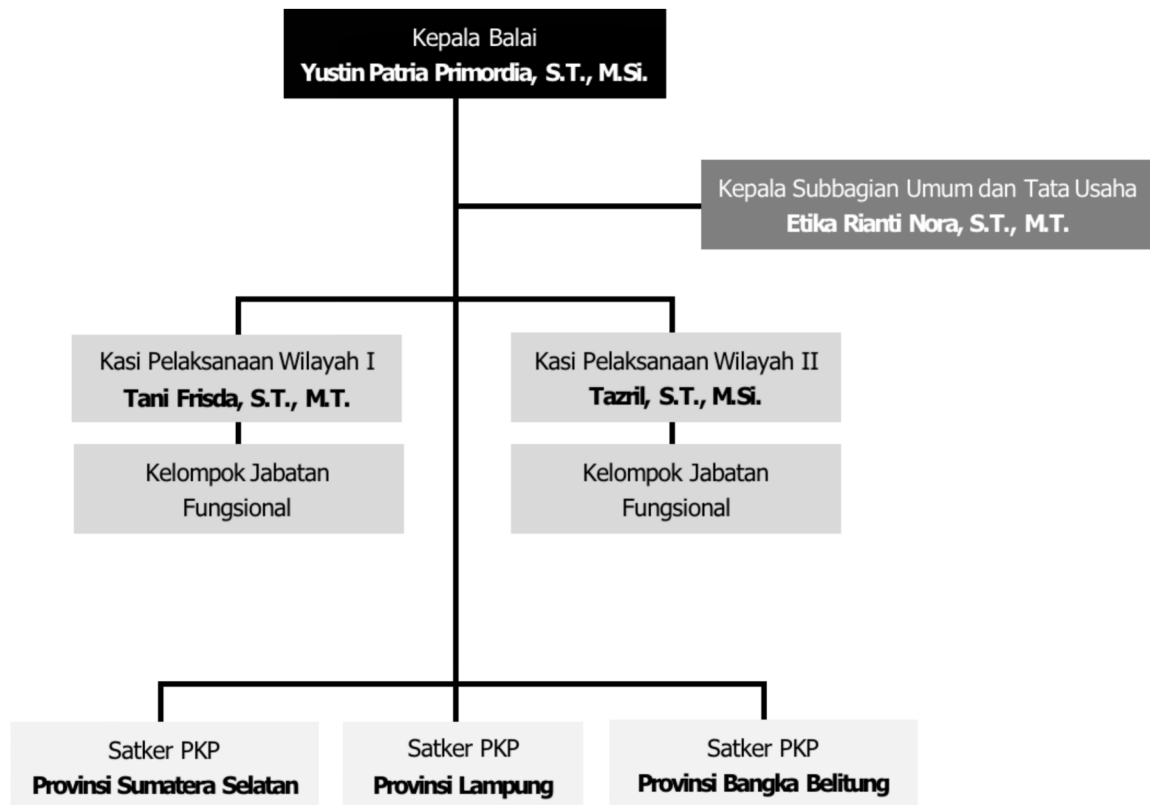
C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V menurut Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur dan Organisasi BP3KP Sumatera V

Adapun struktur organisasi di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V dapat dijabarkan melalui bagan di bawah ini.



Gambar 1.2 Struktur Pegawai BP3KP Sumatera V

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tersebut, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, memiliki susunan organisasi yang terdiri atas:

1. Subbagian Umum dan Tata Usaha

Subbagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan administrasi sumber daya manusia, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas, koordinasi administrasi pelaksanaan sistem pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

2. Seksi Pelaksanaan Wilayah I

Seksi Pelaksanaan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pembinaan usaha dan perlindungan konsumen, serta koordinasi dan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial dan melakukan koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data, pada wilayah pesisir sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai delineasi perkotaan, perdesaan, dan pesisir.

3. Seksi Pelaksanaan Wilayah II

Seksi Pelaksanaan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis perumahan, koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data pada wilayah perkotaan dan perdesaan sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai delineasi perkotaan, perdesaan, dan pesisir.

4. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.



BAB II

CAPAIAN KINERJA

A. Target Kinerja Triwulan III

Target penetapan kinerja indikator kinerja dan kegiatan pada Satuan Kerja BP2P Sumatera V pada Triwulan III Tahun 2025 dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2.1 Target Penetapan Kinerja Triwulan Satker BP3KP Sumatera V

NO	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	SATUAN	PAGU (Rp Ribu)	RENCANA KEU FISIK	
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman					
1.	Pemantauan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Laporan	90.694.000	31,28	31,28
2.	Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan	50.000.000	0,00	0,00
3.	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1 Laporan	330.300.000	0,00	0,00
Total			470.994.000	6,02	6,02
Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan					
1.	Sinkronisasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan Pusat dan Daerah	1 Rekomendasi Kebijakan	380.786.000	1,94	1,94
2.	Verifikasi Bantuan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	190.300.000	2,10	2,10
3.	Verifikasi Bantuan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	313.405.000	2,51	2,51
4.	Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan	226.972.000	13,12	13,12
Total			1.111.463.000	4,41	4,41
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan					
1.	Sinkronisasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan Pusat dan Daerah	1 Kegiatan	217.536.000	0,00	0,00
2.	Kegiatan Pengendalian Program Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan di BP3KP Sumatera V	1 Layanan	146.044.000	0,00	0,00
Total			363.580.000	0,00	0,00
Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko					
1.	Penerapan Manajemen Risiko	1 Rekomendasi Kebijakan	174.233.000	6,12	6,12
2.	Pembangunan Zona Integritas BP3KP Sumatera V	1 Rekomendasi Kebijakan	129.233.000	2,03	2,03
Total			303.466.000	4,38	4,38

Lanjutan Tabel 2.1 Target Penetapan Kinerja Triwulan Satker BP3KP Sumatera V

NO	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	SATUAN	PAGU (Rp Ribu)	RENCANA KEU FISIK	
Sekretariat Jenderal					
1.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor BP3KP Sumatera V	1 Layanan	413.996.000	26,21	26,21
2.	Langganan Daya dan Jasa	12 Bulan	98.000.000	48,81	48,81
3.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	151.482.000	34,48	34,48
4.	Honor Operasional Satuan Kerja	12 Bulan	240.678.000	18,81	18,81
5.	Perjalanan Dinas	1 Layanan	192.469.000	0,00	0,00
Total			1.096.625.000	23,15	23,15

Sumber : e-Monitoring status 30 September 2025

Target penetapan kinerja indikator kinerja dan kegiatan pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan III Tahun 2025 dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2.2 Target Penetapan Kinerja Triwulan Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sumatera Selatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT	SATUAN	PAGU (Rp Ribu)	RENCANA KEU	FISIK
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman					
1.	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1 Laporan	22.000.000	95,45	95,45
2.	Perencanaan dan Supervisi Pelaksanaan PSU Kawasan Permukiman	1 Paket	90.000.000	31,75	31,75
3.	Pembangunan PSU Lingkungan Hunian	1 Paket	2.279.669.000	0,00	0,00
4.	Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan PSU	1 Laporan	125.000.000	14,00	14,00
5.	Perencanaan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah	1 Dokumen	36.000.000	0,00	0,00
6.	Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah	1 Paket	1.200.000.000	0,00	0,00
7.	Pengawasan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah	1 Paket	81.004.000	0,00	0,00
Total			3.833.673.000	1,12	1,12
Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan					
1.	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan	502.973.000	11,07	11,07
2.	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	10 Unit	200.000.000	0,00	0,00
3.	Pengawasan Pengendalian Pembangunan Rumah Swadaya	1 Laporan	157.592.000	2,44	2,44
4.	Perencanaan Pembangunan Rumah Susun BPKP Palembang	1 Dokumen	150.000.000	0,00	0,00
5.	Pembangunan Rumah Susun BPKP Palembang	1 Paket	3.436.518.000	0,00	0,00
6.	MK Pembangunan Rumah Susun BPKP Palembang	1 Paket	177.002.000	0,00	0,00
7.	Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Rumah Susun BPKP Palembang	1 Laporan	32.859.000	0,00	0,00
Total			4.656.944.000	1,28	1,28
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan					
1.	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan	111.399.000	31,00	31,00
2.	Pelaksanaan Fisik Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	356 Unit	7.120.000.000	0,00	0,00
3.	Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian dan Pendampingan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	1 Laporan	687.376.000	7,29	7,29

Lanjutan Tabel 2.2 Target Penetapan Kinerja Triwulan Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sumatera Selatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT	SATUAN	PAGU (Rp Ribu)	RENCANA	
				KEU	FISIK
4.	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1 Laporan	45.972.000	0,00	0,00
Total			7.964.747.000	1,06	1,06
Sekretariat Jenderal					
1.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Dokumen	369.678.000	21,04	21,04
2.	Langganan Daya dan Jasa	1 Laporan	49.200.000	11,83	11,83
3.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	1 Laporan	119.870.000	6,90	6,90
4.	Honor Operasional Satuan Kerja	1 Dokumen	306.446.000	20,10	20,10
5.	Layanan Umum Satker PKP Provinsi Sumatera Selatan	1 Layanan	226.464.000	0,00	0,00
Total			1.071.658.000	14,32	14,32

Sumber : e-Monitoring status 30 September 2025

Target penetapan kinerja indikator kinerja dan kegiatan pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung pada Triwulan III Tahun 2025 dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2.3 Target Penetapan Kinerja Triwulan Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Lampung

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT	SATUAN	PAGU (Rp Ribu)	RENCANA KEU FISIK	
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman					
1.	Pemataan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1 Laporan	115.005.000	15,00	15,00
2.	Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	901 Unit	18.020.000.000	0,00	0,00
3.	Pengawasan dan Pengendalian Bantuan Stimulan Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	1 Laporan	1.741.375.000	5,00	5,00
Total			19.876.380.000	0,52	0,52
Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan					
1.	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	197 Unit	3.940.000.000	0,00	0,00
2.	Pengawasan Pengendalian Pembangunan Rumah Swadaya	1 Laporan	365.943.000	0,00	0,00
3.	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan	501.017.000	0,00	0,00
Total			4.806.960.000	0,00	0,00
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan					
1.	Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan	98.587.000	0,00	0,00
2.	Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	1.296 Unit	25.920.000.000	0,00	0,00
3.	Pendampingan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1 Laporan	1.687.436.000	0,00	0,00
4.	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1 Laporan	104.658.000	0,00	0,00
Total			27.810.681.000	0,00	0,00
Sekretariat Jenderal					
1.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Lampung	1 Layanan	132.117.000	0,00	0,00

Lanjutan Tabel 2.3 Target Penetapan Kinerja Triwulan Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Lampung

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT	SATUAN	PAGU (Rp Ribu)	RENCANA	
				KEU	FISIK
2.	Layanan Daya dan Jasa	1 Layanan	72.000.000	0,00	0,00
3.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	1 Layanan	122.116.000	0,00	0,00
4.	Honor Operasional Satuan Kerja	1 Layanan	213.200.000	0,00	0,00
5.	Layanan Umum Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung	1 Layanan	200.294.000	0,00	0,00
Total			739.727.000	0,00	0,00

Sumber : e-Monitoring status 30 September 2025

Target penetapan kinerja indikator kinerja dan kegiatan pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bangka Belitung pada Triwulan III Tahun 2025 dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2.4 Target Penetapan Kinerja Triwulan Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Bangka Belitung

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT	SATUAN	PAGU (Rp Ribu)	RENCANA KEU FISIK	
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman					
1.	Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh di Provinsi Kep. Bangka Belitung	1 Laporan	80.000.000	0,00	0,00
2.	Pelaksanaan Penanganan Permukiman Kumuh di Provinsi Kep. Bangka Belitung	1 Kegiatan	1.500.000.000	0,00	0,00
3.	Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Kawasan Permukiman di Provinsi Kep. Bangka Belitung	300 Unit	6.000.000.000	18,07	18,07
4.	Perencanaan dan Pengawasan Kegiatan Rumah Swadaya di Provinsi Kep. Bangka Belitung	1 Laporan	672.925.000	3,80	3,80
5.	Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Permukiman Kumuh di Provinsi Kep. Bangka Belitung	1 Laporan	162.008.000	11,89	11,89
6.	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Kawasan Permukiman di Provinsi Kep. Bangka Belitung	1 Laporan	86.148.000	0,00	0,00
Total			8.501.081.000	13,28	13,28
Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan					
1.	Pelaksanaan, Pemantauan, Pengendalian dan Pelaporan	1 Laporan	502.781.000	18,67	18,67
2.	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Provinsi Kep. Bangka Belitung	50 Unit	1.000.000.000	14,40	14,40
3.	Pengawasan Pengendalian Pembangunan Rumah Swadaya	1 Laporan	192.974.000	0,00	0,00
Total			1.795.755.000	14,03	14,03
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan					
1.	Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan Provinsi Kep. Bangka Belitung	1 Laporan	39.950.000	0,00	0,00
Total			39.950.000	0,00	0,00
Sekretariat Jenderal					
1.	Langgganan Daya dan Jasa	1 Layanan	27.460.000	20,20	20,20
2.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kep. Bangka Belitung	1 Layanan	453.017.000	25,00	25,00
3.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	1 Layanan	28.500.000	7,00	7,00
4.	Honor Operasional Satuan Kerja	16 OB	167.512.000	5,00	5,00
5.	Honorarium Pejabat Inti Satker	1 Dokumen	43.070.000	0,00	0,00
Total			719.559.000	17,95	17,95

Sumber : e-Monitoring status 30 September 2025

B. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran pencapaian sasaran digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V. Pengukuran yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada indikator kinerja yang berupa indikator masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran. Perhitungan persentase pencapaian target baik dalam pencapaian kegiatan maupun pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ Pencapaian Target} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Berdasarkan perhitungan di atas dapat dikatakan bahwa pencapaian target diukur melalui perbandingan antara realisasi terhadap rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini berlaku terhadap pekerjaan fisik maupun penunjang di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan yang berada di wilayah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V.

C. Capaian Target Triwulan

1. Capaian Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V

Tabel 2.5 Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan Satker BP3KP Sumatera V

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT	SATUAN	PAGU (Rp Ribu)	REALISASI (Rp Ribu)	RENCANA		REALISASI		CAPAIAN
					KEU	FISIK	KEU	FISIK	
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman									
1.	Pemantauan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Laporan	90.694.000	28.369.083	31,28	31,28	31,28	31,28	100,00%
2.	Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan	50.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1 Laporan	330.300.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Total			470.994.000	28.369.083	6,02	6,02	6,02	6,02	
Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan									
1.	Sinkronisasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan Pusat dan Daerah	1 Rekomendasi Kebijakan	380.786.000	7.387.248	1,94	1,94	1,94	1,94	100,00%
2.	Verifikasi Bantuan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	190.300.000	3.996.300	2,10	2,10	2,10	2,10	100,00%

Lanjutan Tabel 2.5 Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan Satker BP3KP Sumatera V

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT	SATUAN	PAGU (Rp Ribu)	REALISASI (Rp Ribu)	RENCANA		REALISASI		CAPAIAN
					KEU	FISIK	KEU	FISIK	
3.	Verifikasi Bantuan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	313.405.000	7.866.465	2,51	2,51	2,51	2,51	100,00%
4.	Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan	226.972.000	29.778.726	13,12	13,12	13,12	13,12	100,00%
Total			1.111.463.000	49.028.739	4,41	4,41	4,41	4,41	
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan									
1.	Sinkronisasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan Pusat dan Daerah	1 Kegiatan	217.536.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.	Kegiatan Pengendalian Program Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan di BP3KP Sumatera V	1 Layanan	146.044.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Total			363.580.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko									
1.	Penerapan Manajemen Risiko	1 Rekomendasi Kebijakan	174.233.000	10.663.059	6,12	6,12	6,12	6,12	100,00%
2.	Pembangunan Zona Integritas BP3KP Sumatera V	1 Rekomendasi Kebijakan	129.233.000	2.623.429	2,03	2,03	2,03	2,03	100,00%
Total			303.466.000	13.286.488	4,38	4,38	4,38	4,38	
Sekretariat Jenderal									
1.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor BP3KP Sumatera V	1 Layanan	413.996.000	108.508.352	26,21	26,21	26,21	26,21	100,00%
2.	Langganan Daya dan Jasa	12 Bulan	98.000.000	47.833.800	48,81	48,81	48,81	48,81	100,00%
3.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	151.482.000	52.230.994	34,48	34,48	34,48	34,48	100,00%
4.	Honor Operasional Satuan Kerja	12 Bulan	240.678.000	45.271.532	18,81	18,81	18,81	18,81	100,00%
5.	Perjalanan Dinas	1 Layanan	192.469.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Total			1.096.625.000	253.844.677	23,15	23,15	23,15	23,15	

Sumber : e-Monitoring status 30 September 2025

2. Capaian Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 2.6 Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan Satker PKP Provinsi Sumatera Selatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT	SATUAN	PAGU (Rp Ribu)	REALISASI (Rp Ribu)	RENCANA		REALISASI		CAPAIAN
					KEU	FISIK	KEU	FISIK	
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman									
1.	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1 Laporan	22.000.000	20.999.000	95,45	95,45	95,45	95,45	100,00%
2.	Perencanaan dan Supervisi Pelaksanaan PSU Kawasan Permukiman	1 Paket	90.000.000	28.575.000	31,75	31,75	31,75	31,75	100,00%
3.	Pembangunan PSU Lingkungan Hunian	1 Paket	2.279.669.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4.	Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan PSU	1 Laporan	125.000.000	17.500.000	14,00	14,00	14,00	14,00	100,00%
5.	Perencanaan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah	1 Dokumen	36.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.	Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah	1 Paket	1.200.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Lanjutan Tabel 2.6 Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan Satker PKP Provinsi Sumatera Selatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT	SATUAN	PAGU (Rp Ribu)	REALISASI (Rp Ribu)	RENCANA		REALISASI		CAPAIAN
					KEU	FISIK	KEU	FISIK	
7.	Pengawasan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah	1 Paket	81.004.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Total			3.833.673.000	67.074.000	1,12	1,12	1,12	1,12	
Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan									
1.	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan	502.973.000	55.679.111	11,07	11,07	11,07	11,07	100,00%
2.	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	10 Unit	200.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.	Pengawasan Pengendalian Pembangunan Rumah Swadaya	1 Laporan	157.592.000	3.845.245	2,44	2,44	2,44	2,44	100,00%
4.	Perencanaan Pembangunan Rumah Susun BPKP Palembang	1 Dokumen	150.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5.	Pembangunan Rumah Susun BPKP Palembang	1 Paket	3.436.518.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.	MK Pembangunan Rumah Susun BPKP Palembang	1 Paket	177.002.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7.	Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Rumah Susun BPKP Palembang	1 Laporan	32.859.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Total			4.656.944.000	59.524.356	1,28	1,28	1,28	1,28	
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan									
1.	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan	111.399.000	34.533.690	31,00	31,00	31,00	31,00	100,00%
2.	Pelaksanaan Fisik Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	356 Unit	7.120.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.	Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian dan Pendampingan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	1 Laporan	687.376.000	50.109.710	7,29	7,29	7,29	7,29	100,00%
4.	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1 Laporan	45.972.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Total			7.964.747.000	84.643.400	1,06	1,06	1,06	1,06	
Sekretariat Jenderal									
1.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Dokumen	369.678.000	77.780.251	21,04	21,04	21,04	21,04	100,00%
2.	Langganan Daya dan Jasa	1 Laporan	49.200.000	5.820.360	11,83	11,83	11,83	11,83	100,00%
3.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	1 Laporan	119.870.000	8.271.030	6,90	6,90	6,90	6,90	100,00%
4.	Honor Operasional Satuan Kerja	1 Dokumen	306.446.000	61.595.646	20,10	20,10	20,10	20,10	100,00%
5.	Layanan Umum Satker PKP Provinsi Sumatera Selatan	1 Layanan	226.464.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Total			1.071.658.000	153.467.287	14,32	14,32	14,32	14,32	

Sumber : e-Monitoring status 30 September 2025

3. Capaian Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung

Tabel 2.7 Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan Satker PKP Provinsi Lampung

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT	SATUAN	PAGU (Rp Ribu)	REALISASI	RENCANA		REALISASI		CAPAIAN
				(Rp Ribu)	KEU	FISIK	KEU	FISIK	
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman									
1.	Pematauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1 Laporan	115.005.000	17.250.750	15,00	15,00	15,00	15,00	100,00%
2.	Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	901 Unit	18.020.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.	Pengawasan dan Pengendalian Bantuan Stimulan Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	1 Laporan	1.741.375.000	87.068.750	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00%
Total			19.876.380.000	104.319.500	0,52	0,52	0,52	0,52	
Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan									
1.	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	197 Unit	3.940.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.	Pengawasan Pengendalian Pembangunan Rumah Swadaya	1 Laporan	365.943.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan	501.017.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Total			4.806.960.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan									
1.	Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan	98.587.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.	Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	1.296 Unit	25.920.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.	Pendampingan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1 Laporan	1.687.436.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4.	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1 Laporan	104.658.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Total			27.810.681.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sekretariat Jenderal									
1.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Lampung	1 Layanan	132.117.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.	Layanan Daya dan Jasa	1 Layanan	72.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	1 Layanan	122.116.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4.	Honor Operasional Satuan Kerja	1 Layanan	213.200.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5.	Layanan Umum Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung	1 Layanan	200.294.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Total			739.727.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Sumber : e-Monitoring status 30 September 2025

4. Capaian Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bangka Belitung

Tabel 2.8 Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan Satker PKP Provinsi Bangka Belitung

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT	SATUAN	PAGU (Rp Ribu)	REALISASI (Rp Ribu)	RENCANA		REALISASI		CAPAIAN
					KEU	FISIK	KEU	FISIK	
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman									
1.	Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh di Provinsi Kep. Bangka Belitung	1 Laporan	80.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.	Pelaksanaan Penanganan Permukiman Kumuh di Provinsi Kep. Bangka Belitung	1 Kegiatan	1.500.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.	Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Kawasan Permukiman di Provinsi Kep. Bangka Belitung	300 Unit	6.000.000.000	1.084.200.000	18,07	18,07	18,07	18,07	100,00%
4.	Perencanaan dan Pengawasan Kegiatan Rumah Swadaya di Provinsi Kep. Bangka Belitung	1 Laporan	672.925.000	25.571.150	3,80	3,80	3,80	3,80	100,00%
5.	Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Permukiman Kumuh di Provinsi Kep. Bangka Belitung	1 Laporan	162.008.000	19.262.751	11,89	11,89	11,89	11,89	100,00%
6.	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Kawasan Permukiman di Provinsi Kep. Bangka Belitung	1 Laporan	86.148.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Total			8.501.081.000	1.129.033.901	13,28	13,28	13,28	13,28	
Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan									
1.	Pelaksanaan, Pemantauan, Pengendalian dan Pelaporan	1 Laporan	502.781.000	93.869.213	18,67	18,67	18,67	18,67	100,00%
2.	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Provinsi Kep. Bangka Belitung	50 Unit	1.000.000.000	144.000.000	14,40	14,40	14,40	14,40	100,00%
3.	Pengawasan Pengendalian Pembangunan Rumah Swadaya	1 Laporan	192.974.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Total			1.795.755.000	237.869.213	14,03	14,03	14,03	14,03	
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan									
1.	Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan Provinsi Kep. Bangka Belitung	1 Laporan	39.950.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Total			39.950.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sekretariat Jenderal									
1.	Langgaganan Daya dan Jasa Operasional dan Pemeliharaan Kantor Satker	1 Layanan	27.460.000	5.546.920	20,20	20,20	20,20	20,20	100,00%
2.	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kep. Bangka Belitung	1 Layanan	453.017.000	113.254.250	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00%
3.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	1 Layanan	28.500.000	1.995.000	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00%
4.	Honor Operasional Satuan Kerja	16 OB	167.512.000	8.375.600	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00%
5.	Honorarium Pejabat Inti Satker	1 Dokumen	43.070.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Total			719.559.000	129.171.770	17,95	17,95	17,95	17,95	

Sumber : e-Monitoring status 30 September 2025

D. Permasalahan dan Faktor Keberhasilan

Beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi selama Triwulan III Tahun 2025 pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V, diantaranya:

- Penyerapan anggaran pada Triwulan III belum maksimal karena beberapa kegiatan baru saja dimulai;
- Pelaksanaan kegiatan BSPS telah memasuki tahap pelaksanaan awal kegiatan;
- Pelaksanaan pembangunan rumah susun memasuki tahap lelang (pemilihan penyedia jasa) menggunakan e-katalog dalam pelaksanaannya;
- Kegiatan peningkatan kualitas sanitasi sedang memasuki tahap perencanaan awal; dan
- Kegiatan Pembangunan PSU Perumahan memasuki tahap lelang pemilihan penyedia jasa yang dilaksanakan dengan e-katalog.

Faktor keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan perencanaan yang telah disusun, sehingga capaian kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal.



BAB III

PENUTUP

A. Rencana Tidak Lanjut

Triwulan III Tahun Anggaran 2025 merupakan awal pelaksanaan kegiatan yang efektif pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V pada Tahun Anggaran 2025. Maka dari itu pelaporan pelaksanaan kegiatan diawali pada Triwulan III dan rencana tindak lanjut disusun untuk permasalahan dan kendala yang dihadapi pada Triwulan III dan akan diupayakan untuk diimplementasikan pada pelaksanaan kegiatan di Triwulan IV Tahun Anggaran 2025.

B. Bukti Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan Sebelumnya

Rencana tindak lanjut dari permasalahan dan kendala yang dihadapi selama Triwulan III akan dilaksanakan pada Triwulan IV, dijelaskan melalui tabel sebagai berikut.

Tabel 3.1 Bukti Tindak Lanjut Permasalahan pada Triwulan III

No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut pada Triwulan IV
(1)	(2)	(3)
1.	Penyerapan anggaran pada Triwulan III belum maksimal karena beberapa kegiatan baru saja dimulai	Akan dilaksanakan percepatan dengan mulai melaksanakan beberapa kegiatan yang telah direncanakan dan menyusun rencana penyerapan anggaran agar lebih efektif
2.	Pelaksanaan kegiatan BSPS telah memasuki tahap pelaksanaan awal kegiatan	Akan dilaksanakan percepatan pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan rencana kerja dan tindak lanjut yang telah disusun serta melaksanakan monitoring berkala selama pelaksanaan kegiatan
3.	Pelaksanaan pembangunan rumah susun memasuki tahap lelang (pemilihan penyedia jasa) menggunakan e-katalog dalam pelaksanaannya	Akan berkoordinasi dengan UKPBJ Kementerian PKP dan melaksanakan percepatan perencanaan dan penyiapan dokumen lelang menggunakan e-katalog
4.	Kegiatan peningkatan kualitas sanitasi sedang memasuki tahap perencanaan awal	Akan disusun perencanaan pelaksanaan kegiatan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan agar selesai tepat sebelum tahun anggaran berakhir
5.	Kegiatan Pembangunan PSU Perumahan memasuki tahap lelang pemilihan penyedia jasa yang dilaksanakan dengan e-katalog	Akan dilaksanakan percepatan perencanaan dan penyiapan dokumen lelang agar pemilihan penyedia jasa dapat segera diselesaikan serta kegiatan pembangunan dapat segera dilaksanakan



LAMPIRAN

- Peresmian dan Perletakan Batu Pertama Kegiatan DAK PPKT serta Pembangunan Rumah Layaj Huni di Kabupaten Bangka dan Bangka Tengah
(1 Agustus 2025)



- Pemeriksaan Usulan PSU Perumahan Atas Prakarsa MBR Komunitas Penyapu Jalan di Desa Anak Petai Kota Prabumulih
(4 Agustus 2025)



- Penandatanganan Kerjasama untuk Penyaluran Dana Program BSPS Ditjen Kawasan Permukiman dan Perumahan Perkotaan di Provinsi Lampung
(22 Agustus 2025)



- Akad Massal Bersama Mitra Perbankan Pengembang Indonesia dalam Rangka Peringatan Hari Perumahan Nasional
(25 Agustus 2025)



- Penandatanganan Kerjasama untuk Penyaluran Dana Program BSPS Ditjen Perumahan Perdesaan di Provinsi Lampung
(28 Agustus 2025)



- Penandatanganan Kerjasama untuk Penyaluran Dana Program BSPS Ditjen Perumahan Perdesaan di Provinsi Sumatera Selatan
(28 Agustus 2025)



- Penandatanganan Kerjasama untuk Penyaluran Dana Program BSPS Ditjen Perumahan Perkotaan di Provinsi Sumatera Selatan
(28 Agustus 2025)



- Sinkronisasi Program TA 2026 Antara Anggota Komisi V DPR RI Bersama Mitra Kerja Komisi V
(29 Agustus 2025)



- Koordinasi Program 3 Juta Rumah Bersama Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang
(3 September 2025)



- Pembekalan Koordinator Kabupaten dan TFL BSPS Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025
(3-4 September 2025)



- Pencanaan Pembangunan Zona Integritas Kementerian PKP
(10 September 2025)



- Kunjungan Inspektur III Kementerian PKP dalam Rangka Pengawasan Aset Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Pekerja Palembang
(9-10 September 2025)



- Kunjungan Inspektur III Kementerian PKP dalam Rangka Pendampingan Serah Terima Aset Rusun Universitas Malahayati Lampung
(16 September 2025)



- Rapat Konsolidasi Capaian Program 3 Juta Rumah dan Penajaman Usulan TA 2026
(18 September 2025)



- Pembekalan Tenaga Fasilitator Lapangan BPS 2025 di Provinsi Lampung
(24 September 2025)



- Verifikasi Teknis Program Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah BP3KP Sumatera V di Kota Pagaralam
(11-13 September 2025)



- Audiensi Program Perumahan Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kota Palembang
(22 September 2025)



- Audiensi Program Perumahan Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin
(24 September 2025)



- Monitoring Perumahan Subsidi dan FLPP
di Provinsi Lampung
(24-25 September 2025)



- Sosialisasi Pembangunan ZI pada TFL
BSPS Provinsi Lampung
(25 September 2025)



LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V